

MENTERI BAPPENAS: PINA MEMBUTUHKAN INSTRUMEN INVESTASI JANGKA PANJANG

Denpasar (10/03) – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara di ASEAN. Oleh karenanya, selama ini daya saing Indonesia masih tertinggal dan hal tersebut menjadi salah satu sebab sulitnya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan infrastruktur yang terbatas, investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia berpikir akan mengeluarkan modal yang lebih besar. Sementara itu, kata Bambang, anggaran infrastruktur pemerintah tahun 2015-2019 hanya mampu membiayai sebesar 41 persen dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur. *Gap* ini didorong Pemerintah untuk dapat diisi oleh BUMN dan swasta.

“Skema Kerjasama Pemerintah dengan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) merupakan solusi untuk mempercepat ketertinggalan infrastruktur di Indonesia,” tutur Menteri Bambang saat menjadi pembicara dalam seminar *Underwriting Network 2017* yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama-sama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Avanya Beach Resort, Bali.

Dalam pengamatan Menteri Bambang, pembiayaan proyek KPBU dan PINA yang memiliki rentang waktu jangka panjang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan dari instrumen-instrumen investasi jangka panjang seperti penawaran umum perdana saham (IPO), obligasi jangka panjang, dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Belum tersedianya instrumen investasi jangka panjang dalam jumlah yang cukup, kata Bambang, membuat investor yang mengelola dana jangka panjang memilih menempatkan ke instrumen investasi jangka pendek, meskipun penempatan tersebut mengandung risiko tidak tercapainya target *return* karena terjadinya *miss-macth*. Dalam hal ini *underwriter* berperan dalam penyiapan, penyusunan, dan penjaminan penggalangan dana di pasar modal dan pasar uang dengan mempertemukan pelaku usaha KPBU dan PINA dengan investor-investor pengelola dana jangka panjang.

“Dengan target pembangunan infrastruktur yang progresif dan keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur melalui KPBU dan PINA, maka peran *underwriter* akan menjadi signifikan dalam mempertemukan *investee* dan investor jangka panjang,” ujar Bambang.

Acara Seminar *Underwriting Network 2017* dibuka dengan sambutan Direktur BEI, Tito Sulistio dan dihadiri oleh *underwriter*, dan investor institusi termasuk manajemen investasi, asuransi, modal ventura, dan dana pensiun. Selain Menteri PPN/Kepala Bappenas, hadir sebagai pembicara adalah Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro. Sebagai bagian dari rangkaian acara, diadakan pula *Networking Night* pada malam harinya dengan

menghadirkan empat *host*, yaitu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiiik Ro; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv; Kepala Bagian Lotas Divisi Hubungan Internasional Kombes Polisi, Akhmad Jamal Yulianto; dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roeslani.

Jakarta, 10 Maret 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Biro Humas dan TU Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650;
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id